



Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan: Membangun Generasi Muda Melek Politik di Era Digital

Safriil Yanda¹, Alfi Mansyur², Aulia Putri Rezky³, Irham Maulida⁴, Dista Setyaningsih⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: Mai 29, 2024

Revised: June 17, 2023

Available online: June 30, 2024

KEYWORDS

IPEK, Arduino Uno, Mikro Kontroler

CORRESPONDENCE

Name: Safriil Yanda

E-mail: Safriil.yanda01@gmail.com

A B S T R A C T

Political and civic education plays a strategic role in fostering democratic awareness and encouraging youth participation in national affairs. However barriers such as inadequate political literacy, misinformation, and lack of interest restrict their participation. This study aims to examine the role of political education in enhancing youth participation in democracy. Using a community-based educational approach, the program implemented seminars, policy debates, and digital media training. The findings indicate that interactive learning methods, such as policy simulations and social media campaigns, effectively increase political awareness and critical thinking among students. Participants showed increased interest in political issues and a better understanding of their rights and responsibilities. The integration of digital platforms further facilitated engagement, making political education more accessible and relevant to youth. The study highlights the importance of revitalizing civic education through participatory methods and digital literacy to empower young voters in shaping a more inclusive and democratic society.

Pendahuluan

Pendidikan politik dan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran demokratis serta partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat, generasi muda dihadapkan pada tantangan besar, termasuk meningkatnya arus informasi yang tidak selalu valid, rendahnya minat terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik, serta kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Anyan, 2019; Sakhi & Najicha, 2023). Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi politik generasi muda serta lemahnya kesadaran terhadap peran mereka dalam sistem demokrasi

Minimnya literasi politik di kalangan generasi muda menjadi salah satu faktor utama rendahnya keterlibatan mereka dalam proses politik. Sebagian besar anak muda menganggap politik sebagai sesuatu yang kompleks, penuh intrik, atau bahkan identik dengan korupsi (Farikiansyah et al., 2024). Akibatnya, mereka cenderung bersikap apatis terhadap dinamika politik, baik dalam pemilihan umum, diskusi kebijakan, maupun aktivitas demokrasi lainnya. Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang masih bersifat teoritis dan kurang membangun kesadaran kritis terhadap realitas politik. Materi yang diajarkan lebih menekankan hafalan konsep pemerintahan tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk memahami dan menganalisis isu-isu politik secara mendalam (Hidayati et al., 2022).

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan tantangan tersendiri dalam pendidikan politik bagi generasi muda. Media sosial dapat menjadi sarana edukasi politik yang efektif, tetapi juga menjadi sumber misinformasi dan propaganda yang dapat membentuk pemahaman politik yang keliru. Kurangnya literasi digital dan politik menyebabkan banyak anak muda mudah terpengaruh oleh hoaks dan narasi politik yang tidak objektif, sehingga berpotensi memperburuk polarisasi di masyarakat (Ramadhan et al., 2024).

Tidak hanya dari faktor internal, keterbatasan ruang partisipasi dalam struktur politik yang masih didominasi oleh generasi yang lebih tua turut menghambat keterlibatan generasi muda. Minimnya representasi pemuda dalam lembaga legislatif dan eksekutif menyebabkan aspirasi dan suara mereka kurang terakomodasi dalam sistem politik (Prasetyo et al., 2020). Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya diskusi politik dalam keluarga dan lingkungan sosial, yang membuat anak muda kehilangan kesempatan untuk memahami politik dari perspektif yang lebih luas (Yahzinka, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi generasi muda. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah merevitalisasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan yang lebih interaktif, seperti diskusi, debat kebijakan, simulasi pemilu, serta studi kasus mengenai isu-isu politik aktual (Anyan, 2019; Putri et al., 2024). Pemanfaatan teknologi dan media digital juga harus dioptimalkan agar anak muda dapat mengakses informasi politik yang kredibel dan meningkatkan literasi digital mereka. Selain itu, mendorong partisipasi pemuda dalam proses demokrasi melalui debat dan advokasi kebijakan menjadi langkah penting yang harus diperhatikan (Dewangga, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pendidikan politik dan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda. Selain itu, artikel ini juga akan membahas metode yang efektif dalam penerapan pendidikan politik serta dampak yang dapat ditimbulkan dalam membangun generasi muda yang lebih sadar politik, kritis, dan bertanggung jawab terhadap masa depan demokrasi. Diharapkan, melalui upaya ini, generasi muda dapat memiliki keterampilan berpikir kritis, sikap yang lebih inklusif, serta kesadaran akan perannya dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kehidupan bernegara yang sehat.

Metode

Untuk meningkatkan literasi politik dan kesadaran kewarganegaraan generasi muda, metode pengabdian yang digunakan dalam program ini mengacu pada pendekatan edukatif dan partisipatif yang berbasis komunitas serta pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda dalam memahami sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Adapun metode yang diterapkan dalam program pengabdian ini meliputi beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Sosialisasi dan Literasi Politik: Program diawali dengan seminar, workshop, dan diskusi publik yang melibatkan akademisi, praktisi politik, serta organisasi kepemudaan. Materi mencakup prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta analisis isu politik. Kegiatan dilakukan secara tatap muka dan daring.
2. *Workshop* dan Simulasi Politik: Peserta mengikuti simulasi pemilu, debat kebijakan, serta studi kasus politik guna memahami proses demokrasi secara praktis. Program ini juga mendorong mereka untuk menyusun dan mengadvokasikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
3. Pemberdayaan Melalui Media Digital: Program ini melatih peserta dalam literasi digital untuk memilah informasi politik, menciptakan konten edukatif, dan menjalankan kampanye digital melalui media sosial guna meningkatkan kesadaran politik di kalangan anak muda.
4. Evaluasi dan Pendampingan Berkelanjutan: Evaluasi dilakukan melalui survei dan wawancara untuk mengukur peningkatan literasi politik serta partisipasi peserta dalam demokrasi. Peserta yang berminat lebih lanjut akan mendapatkan mentoring dari tokoh politik, akademisi, dan aktivis.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada 5 Desember 2024, di SMA 1 Woyla, merupakan sebuah inisiatif untuk memberikan pendidikan politik kepada para pemilih pemula, khususnya anggota OSIS yang berperan sebagai wakil siswa. Program ini dirancang dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang berbasis komunitas, serta mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau generasi muda secara lebih luas. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, melainkan juga memberikan pengalaman langsung dalam memahami sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Melalui rangkaian aktivitas yang terintegrasi, para peserta mendapatkan kesempatan untuk menyelami berbagai aspek politik secara praktis, sehingga mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai demokrasi yang esensial untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.



Gambar 1. Antusiasme siswa dalam diskusi pendidikan politik

Sebagian besar peserta menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terkait dengan alasan mengapa mereka perlu terlibat dalam politik. Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan bahwa mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa politik bukan hanya urusan elit, tetapi sesuatu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Politik adalah aktivitas manusia yang paling penting karena melibatkan interaksi warga negara yang bebas dan setara dalam membentuk kehidupan bersama (Koten, 2023). Oleh karena itu, mengenalkan politik kepada generasi muda sangatlah penting karena mereka akan menjadi penentu dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Politik yang tidak hanya tentang memilih, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat berperan aktif dalam mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah. Dalam konteks ini juga bahwa politik adalah cara untuk mengatur sumber daya dan menciptakan aturan yang akan mempengaruhi kehidupan bersama. Mengajarkan peserta mengenai ini membantu mereka untuk mengerti bahwa mereka harus terlibat aktif dalam politik untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.

Kesadaran politik yang berkembang sejak dini dapat mendorong generasi muda untuk lebih kritis dalam menilai kebijakan serta aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Partisipasi politik yang kuat dari masyarakat, khususnya anak muda, dapat memperkuat sistem demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan serta kepentingan publik dan juga membangun pemahaman politik yang baik bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

Namun, sebagian besar peserta masih kurang memiliki literasi politik yang memadai sebelum mengikuti kegiatan ini. Banyak dari mereka tidak mengetahui mekanisme dasar dalam pemilu, apalagi konsep-konsep yang lebih dalam mengenai politik, seperti hubungan antara kekuasaan, kebijakan publik, dan partisipasi warga negara. Hal ini merupakan permasalahan umum di kalangan pemilih pemula, yang sering kali merasa bahwa politik bukan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Rendahnya tingkat literasi politik ini berisiko menurunkan partisipasi dalam pemilu serta memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan (Ridha & Riwanda, 2020). Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut dan mengajarkan mereka mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih dan berperan aktif dalam proses politik. Literasi politik yang baik tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap mekanisme pemilu, tetapi juga mendorong partisipasi kewarganegaraan yang lebih aktif, terutama di era digital yang semakin dipenuhi oleh arus informasi politik.



Gambar 2. Sesi edukasi politik bagi generasi muda

Selama kegiatan, setelah pemateri menjelaskan mengenai konsep dasar politik, para peserta mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap peran mereka dalam pemilu. Mereka mengajukan pertanyaan terkait cara memilih pemimpin yang baik, serta apa yang dimaksud dengan daerah pemilihan (dapil) dan sistem pemilu yang berlaku. Dari sini, kita bisa melihat bahwa para peserta mulai menyadari bahwa memilih pemimpin tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mereka sukai, tetapi juga mengenai pemahaman mendalam tentang visi, misi, dan kebijakan yang ditawarkan oleh calon pemimpin. Dengan meningkatnya pemahaman mereka tentang pentingnya memilih pemimpin yang tepat, peserta mulai menganggap partisipasi dalam pemilu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial mereka. Bahwa partisipasi dalam pemilu bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan rakyat.

Keterlibatan teknologi digital dalam program ini juga membuka peluang baru bagi pengembangan literasi politik. Melalui platform-platform digital, peserta tidak hanya mendapatkan materi edukasi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam pembuatan dan penyebaran konten yang relevan dengan isu-isu politik terkini. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan edukasi terbukti efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi generasi muda. Para peserta belajar untuk memanfaatkan berbagai fitur digital untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang informatif dan mengedukasi, sehingga mereka dapat menginspirasi teman-teman sebayanya untuk lebih peduli terhadap demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan politik tradisional dengan teknologi digital dapat menghasilkan pendekatan yang lebih modern dan efektif, terutama dalam menghadapi tantangan era informasi saat ini.

Keterlibatan teknologi digital dalam program ini tidak hanya sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat interaktif yang memungkinkan peserta berpartisipasi secara aktif dalam membangun pemahaman politik mereka sendiri. Dalam era digital, akses terhadap informasi semakin luas dan cepat, sehingga pendekatan konvensional dalam pendidikan politik perlu beradaptasi agar lebih relevan dengan kebiasaan generasi muda yang terbiasa mengonsumsi informasi melalui platform daring. Melalui berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi kreator konten yang dapat menyebarkan pesan-pesan edukatif kepada komunitas mereka. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan edukasi terbukti efektif dalam menarik perhatian generasi muda, yang lebih tertarik pada konten visual dan narasi yang mudah dipahami. Dengan bimbingan dari mentor dan fasilitator, peserta diajarkan cara membuat konten yang menarik, seperti infografis tentang kebijakan publik, video pendek yang membahas proses pemilu, hingga analisis mendalam tentang isu-isu politik. Ini memungkinkan mereka untuk mengartikulasikan pandangan mereka secara kreatif dan menyebarkan kesadaran politik dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Selain sebagai sarana edukasi, teknologi digital juga dimanfaatkan untuk mengasah keterampilan peserta dalam mendeteksi informasi hoaks dan propaganda politik. Melalui pelatihan literasi digital, peserta belajar mengenali sumber berita yang kredibel, memahami teknik manipulasi informasi yang sering digunakan dalam kampanye politik, serta cara mengklarifikasi atau melawan misinformasi yang tersebar di media sosial. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi lebih kritis dalam menerima informasi, tetapi juga memiliki keterampilan untuk menjadi agen edukasi di komunitas mereka. Integrasi antara pendidikan politik tradisional dengan teknologi digital ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang lebih modern dan interaktif dapat meningkatkan efektivitas literasi politik di kalangan generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan politik dapat lebih inklusif, menarik, dan relevan dengan realitas anak muda saat ini. Program ini juga membuka peluang bagi peserta untuk menjadi bagian dari ekosistem digital yang lebih luas, di mana mereka dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran politik secara kolektif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Di sisi lain, kegiatan ini juga membahas pentingnya pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Peserta diingatkan bahwa peran mereka tidak berhenti setelah memilih, tetapi mereka juga harus terus mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan yang diambil, serta memberikan feedback kepada pemerintah jika diperlukan. Bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada saat pemilu, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan pengabdian ini, ditemukan bahwa masih banyak peserta yang belum memahami hak politik mereka, khususnya terkait dengan proses pendaftaran sebagai pemilih dalam pemilu mendatang. Ketidaktahuan ini dapat berakibat pada rendahnya partisipasi politik, karena banyak pemilih pemula yang terlewat dari proses administrasi dan akhirnya tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai mekanisme pendaftaran pemilih agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Sosialisasi

mengenai pendaftaran pemilih menjadi aspek krusial dalam pendidikan politik, terutama bagi generasi muda yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa informasi terkait prosedur pendaftaran pemilih disampaikan secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, seminar, serta kampanye digital yang dirancang khusus untuk menjangkau pemilih pemula.

Evaluasi terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan memiliki dampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran politik peserta. Sebagian besar peserta melaporkan bahwa mereka kini lebih memahami tentang pentingnya terlibat dalam pemilu, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Mereka juga mengaku lebih siap untuk menggunakan hak suara mereka secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kesadaran ini sejalan dengan pandangan Habermas, yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik untuk menjaga kualitas demokrasi (Elly Nur Rahmawati, Samsuri, 2024). Selain itu, meningkatnya pemahaman peserta mengenai pengawasan kebijakan juga akan membantu mereka menjadi lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, yang akan mendorong sistem demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi generasi muda memiliki peran krusial dalam memperkuat sistem demokrasi. Dengan meningkatnya literasi politik dan kesadaran partisipatif, generasi muda dapat lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi mereka dalam proses politik tidak hanya akan memperkuat demokrasi di masa kini, tetapi juga memastikan keberlanjutannya di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan politik yang diberikan perlu diperluas agar mencakup berbagai aspek kehidupan berpolitik, termasuk pengawasan kebijakan, keterlibatan dalam diskusi publik, serta pemahaman mengenai hak-hak sipil. Sinergi antara lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam memperkuat kesadaran politik di kalangan generasi muda. Kolaborasi ini akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan generasi muda tidak hanya memahami politik sebagai proses elektoral, tetapi juga sebagai ruang untuk berpartisipasi secara berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran demokratis yang lebih kuat dan berdaya guna di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pendidikan politik dan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran demokrasi dan mendorong partisipasi generasi muda dalam proses politik. Minimnya literasi politik, maraknya misinformasi, serta sikap apatis terhadap kebijakan publik menjadi tantangan utama yang dapat menghambat peran mereka dalam demokrasi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang lebih interaktif, seperti sosialisasi, simulasi politik, serta pemanfaatan media digital, mampu meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan mereka dalam demokrasi. Selain itu, integrasi teknologi dalam pendidikan politik juga terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis terhadap informasi politik serta mendorong keterlibatan aktif dalam diskusi dan advokasi kebijakan. Partisipasi generasi muda dalam politik bukan hanya sekadar hak, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, serta komunitas masyarakat sipil dalam mengembangkan program pendidikan politik yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda di era digital. Dengan demikian, diharapkan generasi muda tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam membangun sistem politik yang lebih transparan, adil, dan partisipatif.

Saran

Pendidikan politik bagi generasi muda perlu diperkuat melalui metode yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman agar mereka lebih memahami peran mereka dalam demokrasi. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung literasi politik. Selain itu,

pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi politik harus dioptimalkan guna menjangkau lebih banyak anak muda dengan informasi yang akurat dan mudah dipahami.

Daftar Pustaka

- Anyan, Y. B. M. &. (2019). Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 9(1), 33–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jip.v9i1.2904>
- Dewangga. (2024). Peran Pemuda Dalam Mengawal Demokrasi Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Era Digital (Studi Kasus: Masa Pemilihan Presiden 2024). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(11), 40–50.
- Elly Nur Rahmawati, Samsuri, S. (2024). Relevance Of Jürgen Habermas' s Deliberative Democracy With Civic Education. *Journal of Humanities and Civic Education*, 2(1), 18–23.
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A., Ma, L., Islam, P. A., Islam, U., & Sunan, N. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512–6523. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>
- Hidayati, E., Eddison, A., & Arianto, J. (2022). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Literasi Politik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Angkatan 2018-2019). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10959–10966. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4169>
- Koten, Y. K. (2023). Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 235–252. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.235-252>
- Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2020). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. *Konservasi Pendidikan*, 3(1), 1–29. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.48>
- Putri, D. A., Dwi Lestari, E., Prawinata, H., Raja, M., Haji, A., Maritim Raja, U., & Maritim, U. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Krisis Konsitusi Di Indonesia: Pelajaran Dari Kasus Sejarah. *Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan*, 12(1), 27–37.
- Ramadhan, D. E., Saputra, A. D., & Hamid, S. A. H. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik Remaja. *Humaniorum*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i2.48>
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Media Literation, Political Literation, and Civic Participation of Novice Voters in Digital Era. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110–121. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Sakhi, R. G., & Najicha, F. U. (2023). Memperkuat Integrasi Nasional Dengan Memanfaatkan Generasi Muda dan Teknologi Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan ...*, 2023(15), 529–537. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/12262%0Ahttps://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/download/12262/5514>